



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERJANJIAN 7 JANUARI 1681 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK EKONOMI
DI KERAJAAN CIREBON (1681 M-1755 M)**

SKRIPSI



FIRLIANNA TIYA DEVIANI
NIM. 14123151170

**JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2016 M/1437 H**



ABSTRAK

Firlianna Tiya Deviani. 14123151170. **Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)**. Skripsi Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam.

Sejarah mencatat bahwa dahulu Cirebon hanyalah sebuah desa kecil di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Pangeran Cakrabuana merupakan perintis berdirinya Kerajaan Cirebon. Dalam perkembangan selanjutnya, Cirebon benar-benar menjadi sebuah kerajaan yang besar dan berdaulat di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Kepemimpinan pasca Sunan Gunung Jati di Kerajaan Cirebon dilanjutkan oleh para penerusnya, mereka adalah Fatahillah, Panembahan Ratu, dan Panembahan Girilaya. Kedaulatan dan kejayaan semasa Sunan Gunung Jati bertahta terus dipertahankan oleh para penerusnya ini. Hingga pada suatu saat, intervensi pihak asing perlahan merongrong pertahanan Cirebon, dimulai dari penguasaan pihak Mataram, Banten, dan VOC. Dari ketiganya, VOC inilah yang mampu menanamkan pengaruhnya dengan kuat di Cirebon melalui sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681.

Penelitian ini secara umum berusaha untuk mengungkapkan bagaimana peristiwa Perjanjian 7 Januari 1681 dapat terjadi dan apa saja implikasi yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut di Kerajaan Cirebon. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses Perjanjian 7 Januari 1681 di Kerajaan Cirebon terjadi? 2) Bagaimana implikasi dari Perjanjian 7 Januari 1681 terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi Kerajaan Cirebon tahun 1681 Masehi sampai 1755 Masehi? Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Mengetahui proses terjadinya peristiwa Perjanjian 7 Januari 1681 di Kerajaan Cirebon. 2) Mengetahui implikasi dari Perjanjian 7 Januari 1681 terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi Kerajaan Cirebon tahun 1681 Masehi sampai 1755 Masehi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah. Tahapan metode sejarah yang dilakukan adalah heuristik (proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian), kritik (verifikasi data-data yang ditemukan), interpretasi, dan terakhir historiografi (penulisan sejarah).

Perjanjian 7 Januari 1681 adalah sebuah perjanjian persahabatan yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681 Masehi di Kerajaan Cirebon. Perjanjian tersebut dilakukan antara tiga Pangeran dari Cirebon yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta (ketiganya merupakan putera dari Panembahan Girilaya) dengan VOC. Implikasi dari perjanjian tersebut adalah melemahnya kekuasaan politik di Kerajaan Cirebon, VOC selalu campur tangan dalam setiap kebijakan ekonomi, dan kebebasan manusia Cirebon menjadi hilang.

Kata Kunci: Kerajaan Cirebon, Perjanjian, dan Implikasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)” oleh Firlianna Tiya Deviani, NIM 14123151170 telah dimunaqosahkan pada tanggal 01 Juni 2016 di hadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora Islam (S.Hum.I) pada Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 14 Juni 2016

Panitia Munaqosah

	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua Jurusan <u>Dedeh Nur Hamidah, M.Ag</u> NIP. 19710404 200112 2 001	15-06-2016	
Sekretaris Jurusan <u>Zaenal Masduqi, M.Ag., M.A</u> NIP. 19720928 200312 1 003	15-06-2016	
Penguji I <u>Dr. Yayat Suryatna, M.Ag</u> NIP. 19611010 198703 1 004	14-06-2016	
Penguji II <u>Dedeh Nur Hamidah, M.Ag</u> NIP. 19710404 200112 2 001	15-06-2016	
Pembimbing I <u>Dr. Anwar Sanusi, M.Ag</u> NIP. 19710501 200003 1 004	15-06-2016	
Pembimbing II <u>Zaenal Masduqi, M.Ag., M.A</u> NIP. 19720928 200312 1 003	15-06-2016	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah



Dr. Hajam, M.Ag

NIP. 19670721 200312 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Persetujuan	iii
Nota Dinas	iv
Pernyataan Otentisitas Skripsi	v
Pengesahan	vi
Riwayat Hidup	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Lampiran	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Ruang Lingkup Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
 BAB II GAMBARAN UMUM CIREBON SEBELUM	
KEDATANGAN VOC	18
A. Cirebon Sebelum Masa Sunan Gunung Jati	18
B. Cirebon Menjadi Kerajaan Islam	35
 BAB III PERJANJIAN 7 JANUARI 1681	 46
A. Cirebon Menjelang Perjanjian 7 Januari 1681	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Perjanjian 7 Januari 1681	61
------------------------------------	----

BAB IV IMPLIKASI PERJANJIAN 7 JANUARI 1681

DI KERAJAAN CIREBON	74
----------------------------------	-----------

A. Melemahnya Kekuasaan Politik di Kerajaan Cirebon	74
B. Campur Tangan VOC dalam Kebijakan Ekonomi	84
C. Kebebasan Manusia Cirebon yang Hilang	93

BAB V PENUTUP	102
----------------------------	------------

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
--------------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam di Nusantara terjadi antara bentang waktu abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Di Timur Tengah pada abad ke-13 Masehi, pusat peradaban Islam telah mengalami keruntuhan sebagai dampak dari serangan dan penghancuran yang dilakukan oleh Bangsa Mongol (Tartar) terhadap Kerajaan Abbasiyah di ibu kotanya Baghdad. Dalam perkembangan selanjutnya pada abad ke-15 Masehi di Nusantara Agama Islam menyebar ke pelosok negeri dengan memanfaatkan wahana perdagangan internasional.¹

Agama Islam berkembang mengikuti jalur pelayaran dan perdagangan. Seiring dengan perkembangan Agama Islam, berkembang pula secara luas pelayaran dan perdagangan laut Nusantara. Jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang sudah ada sejak zaman kuno kini kian bertambah ramai. Demikian pula pelayaran dan perdagangan antar Nusantara yakni antara Malaka dan Maluku, yang pada waktu itu diselenggarakan oleh pedagang-pedagang Jawa menjadi bertambah ramai. Laut Jawa menjadi jalur utama yang menghubungkan kedua bagian dari wilayah Indonesia tersebut, oleh karena itu Pulau Jawa menjadi daerah yang ramai.²

Ketika Islam datang memasuki Jawa Barat sejak akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, di Jawa Barat masih berdiri dua kerajaan Hindu, ialah Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh.³ Cirebon juga tidak luput dari penguasaan Kerajaan Pajajaran. Cirebon sekitar abad ke-14 telah dikenal sebagai kota

¹ Hasan Muarif Ambary, 1996, *Peran Cirebon sebagai Pusat Perkembangan dan Penyebaran Islam* dalam Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah “Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra”, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hlm. 35

² A. Daliman, 2012, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 6

³ *Ibid.*, hlm. 140



pelabuhan yang ramai. Selain memiliki wilayah pantai, Cirebon juga memiliki wilayah pegunungan yang tinggi dan lembah yang subur, sungai-sungai besar yang cukup banyak, serta memiliki pelabuhan paling aman dan bersejarah. Lewat pelabuhan pulalah para pembawa misi Agama Islam datang ke Cirebon.⁴

Pada abad ke-15 dan 16 Masehi, Cirebon merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antarpulau. Lokasinya di Pantai Utara yang berbatasan dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuat Cirebon memiliki peran yang strategis sebagai pelabuhan dan “jembatan” antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga terciptalah suatu kebudayaan yang khas. Pelabuhan Cirebon⁵ yang letaknya di ujung timur Pantai Utara Tatar Sunda menjadi lalu lintas perdagangan internasional pada masanya. Pada awalnya kota ini merupakan sebuah pemukiman nelayan yang tidak berarti. Selanjutnya berkembang menjadi pedukuhan (desa) bernama Dukuh Pasambangan yang terletak kurang lebih lima kilometer di sebelah utara Kota Cirebon sekarang. Kota Cirebon saat itu semula dikenal dengan sebutan Kebon Pesisir atau Tegal Alang-alang yang kemudian disebut Lemah Wungkuk, desa dimana Ki Gedeng Alang-alang membuat pemukiman masyarakat Muslim dan menjadi cikal bakal pusat penyebaran Agama Islam di daerah sekitarnya.⁶

Dalam naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* disebutkan bahwa ada dua orang guru Agama Islam yang datang di daerah Jawa Barat. Pertama, yaitu Syekh Hasanudin bergelar Syekh Qura yang mendirikan pondok pesantren di Karawang. Di sana putri dari juru labuhan Muara Jati yakni Ki Gedeng Tapa, Nyai Subang Larang belajar kepada Syekh Qura. Kemudian selanjutnya dia diperistri oleh Prabu Siliwangi. Kedua, guru Agama Islam yang lainnya adalah

⁴ Nurhasanah, 2013, *Peran Nyi Mas Gandasari dalam Pendirian Pesantren Qura' Khusus Perempuan dan Pengaruhnya dalam Gerakan Dakwah Islam di Cirebon*, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon: tidak diterbitkan, hlm. 1

⁵ Pelabuhan Cirebon yang dimaksud adalah **Pelabuhan Muara Jati** yang terletak di wilayah yang disebut Singapura pada masa Kerajaan Galuh. Pelabuhan Muara Jati ini ramai disinggahi oleh pedagang-pedagang asing yang agamanya berbeda-beda pula.

⁶ Nina H. Lubis, 1956, *Sejarah Tatar Sunda*, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, hlm. 168-169



Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Idofi yang juga disebut dengan Syekh Nurjati. Ia tiba di Pasambangan bersama 12 orang pengikutnya (10 laki-laki dan 2 perempuan). Mereka diterima dengan baik oleh penguasa setempat dan diberi tempat tinggal di Gunung Amparan Jati, kemudian didirikanlah sebuah pondok (pesantren).⁷

Dengan masuk dan berkembangnya Agama Islam di daerah Jawa Barat melalui datangnya dua guru Agama Islam tersebut, hal itu membuat dua putra Raja Sunda yakni Raden Walangsungsang⁸ dan adiknya Nyai Larasantang tergugah untuk memeluk agama baru tersebut. Mereka berdua kemudian keluar dari lingkungan keraton dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Amparan Jati. Menurut *Babad Cirebon*, Syekh Nurjati mengganti nama Walangsungsang menjadi Somadullah.⁹

Somadullah diperintah oleh Syekh Nurjati setelah belajar beberapa tahun kepadanya (sekitar dua tahun) untuk mendirikan sebuah pemukiman. Somadullah bersama dengan adiknya Nyai Larasantang pergi menuju Kebon Pesisir Lemah Wungkuk ditemani seorang santri. Di sana telah menetap Ki Gedeng Alang-alang yang kemudian mengangkat Somadullah menjadi anak angkat dengan nama Cakrabumi. Lalu pada hari minggu tanggal 1 Sura tahun 1367 Saka (1445 Masehi) berdasarkan perintah gurunya, Cakrabumi mulai membuka hutan untuk dijadikan pemukiman.¹⁰

⁷ Atja, 1986, *Carita Purwaka Caruban Nagari Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*, Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, hlm. 88

⁸ Dia memiliki banyak nama. Setelah sampai di Cirebon dan berguru pada Syekh Nurjati, namanya diganti menjadi **Somadullah**. Kemudian dia diperintahkan pergi ke Kebon Pesisir dan tinggal bersama Ki Gedeng Alang-alang, dan diangkat menjadi anak dengan diberi nama **Cakrabumi**. Setelah beberapa lama, Raden Walangsungsang pergi ke Makkah untuk berhaji kemudian kembali lagi ke Cirebon disebut dengan bergelar **Haji Abdullah Iman**. Lalu keetika menjabat sebagai Kuwu Cirebon kedua, digantilah nama serta gelarnya menjadi **Pangeran Cakrabuana**. Dan tak lama kemudian Prabu Siliwangi (ayahnya) menganugraahkan gelar tumenggung kepada Pangeran Cakrabuana, dengan gelar tersebut dia mendapat nama dan gelar baru yaitu **Tumenggung Sri Mangana**.

⁹ Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, 1991, *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas*, Bandung: Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Barat, hlm. 24

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25



Dukuh Tegal Alang-alang bertambah ramai, hal ini disebabkan karena banyak warga masyarakat Pasambangan yang pindah ke sana untuk berdagang, menangkap ikan, namun tidak ada yang bertani. Ki Gedeng Alang-alang oleh masyarakat dipilih sebagai *kuwu* yang pertama, sedangkan Ki Somadullah ditunjuk sebagai *pangraksa bumi* dengan gelar Ki Cakrabumi. Setelah tiga tahun Ki Cakrabumi menetap di Dukuh Tegal Alang-alang, nama pedukuhan tersebut berubah menjadi Desa Caruban Larang. Hal ini dikarenakan di desa tersebut banyak tinggal orang-orang dari berbagai bangsa dengan agama, bahasa, tulisan serta tabiat dan juga pekerjaan yang berbeda-beda.¹¹

Setelah cukup lama Raden Walangsungsang menjabat *pangraksa bumi*, suatu ketika Syekh Nurjati yang berada di Pasambangan menyarankan agar Ki Cakrabumi pergi menunaikan Ibadah Haji ke Makkah. Kemudian Ki Cakrabumi berangkat ke tanah suci bersama adiknya Nyai Larasantang, tanpa disertai isterinya (Nyai Indang Geulis) karena sedang hamil tua. Selama di Makkah mereka tinggal di rumah Syekh Bayanullah, adik dari Syekh Datuk Kahfi dan berguru kepada Syekh Abu Yazid. Di sana Nyai Larasantang¹² diperistri oleh bangsawan Arab yaitu Maulana Sultan Muhammad bergelar Syarif Abdullah.

Kemudian Ki Cakrabumi kembali lagi ke Jawa dan sebelumnya berhenti di Negeri Campa. Sesampainya di Caruban Larang, Haji Abdullah Iman mendirikan Langgar Jalagrahan dan rumah besar (rumah besar itu akhirnya menjadi istana bernama Dalem Agung Pakungwati). Haji Abdullah Iman menjalankan kembali tugas-tugasnya sebagai pembantu Ki Kuwu Caruban, dan mengajar agama Islam kepada penduduk sekitar. Hingga Ki Kuwu Caruban wafat, kemudian Haji Abdullah Iman menggantikan kedudukannya menjadi Kuwu Caruban kedua,

¹¹ Atja., *Op.cit.*, hlm. 89

¹² Setelah melaksanakan Ibadah Haji, Nyai Larasantang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Sedangkan kakaknya bergelar Haji Abdullah Iman. Di Makkah Sarifah Mudaim melahirkan seorang putra bernama Syarif Hidayat. Setelah kelahiran itu, mereka kembali ke Mesir. Karena suami Syarifah Mudaim seorang penguasa Mesir putra Ali Nurul Alim dari wangsa Hasyim, berasal dari Bani Ismail yang dahulu berkuasa di Kota Ismailiya, juga membawahi Bani Israil di wilayah Palestina. (Atja, 1986, *Carita Purwaka Caruban Nagari Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*, hlm. 90)



maka digantilah nama dan gelarnya menjadi Pangeran Cakrabuana.¹³ Selanjutnya pada tahun 1469 Masehi, Pangeran Cakrabuana diberi jabatan sebagai Tumenggung Naradipa yang setara dengan Prabu Anom/Raja Muda dan mendapat gelar dari ayahnya (Prabu Siliwangi) dengan gelar Sri Mangana.¹⁴

Masuk dan berkembangnya Islam di daerah Jawa Barat semakin kuat setelah Syarif Hidayatullah¹⁵ (keponakan Pangeran Cakrabuwana) datang ke Cirebon. Pada tahun 1470 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon dan menetap di Bukit Amparan Jati sebagai guru Agama Islam. Kemudian Pangeran Cakrabuwana menyerahkan kekuasaannya atas Cirebon kepada Syarif Hidayatullah (Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati), kemenakan sekaligus menantunya pada tahun 1479 Masehi.

Setelah Sunan Gunung Jati memegang pemerintahan di Cirebon, ia memproklamirkan bahwa Cirebon berdiri sendiri yang bebas dari ikatan dengan pemerintah pusat di Pakuan Pajajaran. Cirebon sebagai negara yang merdeka dan otonom ditandai dengan penghentian pemberian upeti kepada kerajaan tersebut. Sejalan dengan usaha penyebaran Agama Islam, Susuhunan Jati meluaskan wilayah kekuasaan Cirebon ke daerah pedalaman. Akan tetapi karena perhatiannya tertuju pada pengembangan Agama Islam, maka Susuhunan Jati mempercayakan urusan pemerintahan kepada putranya, yakni Pangeran Pasarean (1528). Walaupun telah mewakili Susuhunan Jati selama kurang lebih 18 tahun, tetapi ia tidak samapai menduduki tahta kerajaan karena tewas di Demak pada tahun 1546 Masehi. Selanjutnya bidang pemerintahan diwakili oleh Fatahillah,

¹³ Unang Sunardjo, 1983, *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon 1479-1809*, Bandung: Tarsito, hlm. 43-45

¹⁴ Ahmad Yani, 2010, *Pengaruh Islam terhadap Makna Simbolik Budaya Keraton-keraton Cirebon*, Penelitian Individual Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon: tidak diterbitkan, hlm. 24

¹⁵ Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1450 Masehi. Di usia 20 tahun ia berniat menjadi guru Agama Islam, lalu ia pergi menuntut ilmu ke Makkah dan Baghdad sebelum berangkat ke Jawa. Syarif Hidayatullah tidak berniat menjadi raja, karena itu kedudukannya sebagai raja di Mesir diberikan kepada adiknya, Syarif Nurullah. Dalam perjalanannya menuju Cirebon, Syarif Hidayatullah singgah di beberapa tempat penyebaran Agama Islam yaitu Gujarat, Pasai, Banten, dan Gresik. (Atja, 1986, *Carita Purwaka Caruban Nagari Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*, hlm. 36)



menantu Susuhunan Jati. Pada tahun 1568 Masehi, Susuhunan Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Sembung. Dengan meninggalnya Susuhunan Jati, maka Fatahillah naik tahta. Ia memerintah Cirebon secara resmi sebagai raja.¹⁶

Fatahillah memerintah Cirebon sampai meninggal pada tahun 1570 Masehi. Oleh karena tidak ada calon lain sepeninggal Fatahillah, maka tahta kerajaan jatuh ke tangan cucunya yaitu Pangeran Emas, putra tertua Pangeran Dipati Carbon atau cicit Susuhunan Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu (I). Ia memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun (1570-1649). Setelah Panembahan Ratu wafat, pemerintahan di Cirebon diserahkan kepada cucunya yang bernama Pangeran Rasmi dengan gelar Panembahan Adiningkusuma (Panembahan Ratu II).¹⁷

Penobatan Panembahan Ratu II disambut baik oleh Sunan Amangkurat I (Raja Mataram periode 1645-1677) karena Panembahan Ratu II adalah menantu Sunan Amangkurat I. Tahun 1650, beberapa lama setelah penobatan Panembahan Ratu II menjadi raja Cirebon, Sunan Amangkurat I mendesak Panembahan Ratu II untuk menyerang Banten, hal tersebut ditempuh setelah upaya diplomatik yang dilakukan oleh Mataram untuk menguasai Banten gagal. Akan tetapi pasukan Banten dapat memukul mundur pasukan Cirebon. Untuk menanamkan pengaruhnya terhadap Cirebon, maka masih di tahun 1650 juga Sunan Amangkurat I mengundang Panembahan Ratu II disertai dua orang putranya yakni Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya berkunjung ke Keraton Mataram. Namun, setelah mereka berada di sana, mereka tidak diizinkan kembali ke Cirebon. Hingga wafatnya Panembahan Ratu II pada tahun 1662 Masehi, ia dimakamkan di bukit Girilaya (sebelah timur Imogiri, kompleks pemakaman keluarga Kerajaan Mataram, Yogyakarta). Selama Panembahan Ratu II ditawan di Mataram, pemerintahan di Cirebon dijalankan oleh Pangeran Wangsakerta, akan

¹⁶ Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Op.cit.*, hlm. 63-65. Fatahillah dimungkinkan menjadi raja selain karena kemampuannya serta jasanya dalam memerintah Cirebon mewakili Susuhunan Jati, juga karena putera-putera dari Susuhunan Jati sudah wafat sebelum Susuhunan Jati wafat, yakni Pangeran Pasarean, Pangeran Jayakelana, Pangeran Bratakelana, sedangkan Pangeran Sabakingkin (Hasanuddin) memerintah di Banten sejak tahun 1552 Masehi.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 66.



tetapi tetap mendapat pengawasan dan tekanan dari wakil-wakil penguasa Mataram yang ditempatkan di Cirebon.¹⁸ Pejabat yang menjadi wakil Mataram di Cirebon, salah satunya adalah Martadipa yang merupakan seorang Syahbandar Cirebon sekitar tahun 1677 Masehi, dan di tahun ini pula Keraton Mataram mendapat serangan dari Pasukan Trunojoyo.

Pada tahun 1677 terjadi serangan besar-besaran pasukan Trunojoyo terhadap Keraton Mataram, ia berhasil menguasai Keraton Mataram selama empat hari (24-28 Juni 1677). Atas permintaan Sultan Ageng Tirtayasa (Banten) karena ia membantu Pasukan Trunojoyo, maka Pangeran Trunojoyo membebaskan Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya dari tahanan Mataram. Selanjutnya Pangeran Trunojoyo membawa kedua pangeran tersebut ke Kediri untuk diserahkan kepada Kiai Nara yang kemudian dibawa ke Banten, sejak saat itu Cirebon berada di bawah pengaruh Banten. Kedua Pangeran tiba di Banten awal Oktober 1677. Sultan Ageng Tirtayasa menyambut kedua pangeran itu dengan upacara kebesaran sebagai tanda penghormatan, disaksikan oleh Pangeran Wangsakerta. Dalam upacara itu, pangeran-pangeran Cirebon mendapat anugerah dari sultan. Sebelum ketiga pangeran kembali ke Cirebon, mereka dilantik oleh Sultan Banten menjadi penguasa di Cirebon.¹⁹ Akan tetapi penganugerahan Sultan tidak disertai dengan penetapan wilayah kekuasaan yang jelas bagi masing-masing Pangeran, hal ini menjadikan konflik di antara ketiga Pangeran.

Konflik internal bermula ketika Pangeran Martawijaya sebagai putra tertua menuntut agar tahta kerajaan Cirebon jatuh kepadanya, karena ia beranggapan sebagai pewaris yang sah. Lalu ia menyampaikan keinginannya kepada utusan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yaitu Van Dick untuk meminta bantuan kompeni. Keinginan Pangeran Martawijaya tentunya ditolak oleh Pangeran Kartawijaya, karena ia dan kakaknya sama-sama dinobatkan sebagai sultan Cirebon. Kemudian Pangeran Kartawijaya meminta perlindungan kepada

¹⁸ A. Sobana Hardjasaputra, dkk, 2011, *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20)*, Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, hlm. 87-89.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 90-91.



Sultan Banten. Sementara itu, Pangeran Wangsakerta pun menuntut untuk berkuasa di Cirebon, karena ketika ayah dan kedua kakaknya ditawan di Mataram, dialah yang menjalankan pemerintahan Kerajaan Cirebon (1650-1677 M). Konflik internal memberikan peluang pada pihak luar yaitu VOC untuk melakukan intervensi. Dengan dalih akan memberikan perlindungan kepada Cirebon dari segala gangguan yang mengancam, maka ditandatangani perjanjian persahabatan antara VOC dan para Sultan Cirebon pada tanggal 7 Januari 1681.²⁰

Jika dilihat dari isi Perjanjian 7 Januari 1681 berimplikasi bahwa sejak saat itu Cirebon sudah tidak lagi menjadi negara yang berdaulat, karena tidak lagi mandiri baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik para sultan Cirebon masih memiliki gelar sebagai sultan akan tetapi dalam menjalankan pemerintahannya mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kompeni. Harga komoditi ekspor yang bersumber dari alam Cirebon ditentukan pula oleh kompeni demi sebesar-besarnya keuntungan yang mereka dapatkan dari sektor ekonomi. Di samping itu, salah satu persyaratan perjanjian yang menyangkut sektor perekonomian adalah kompeni berhak untuk membangun benteng (loji) di Cirebon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengungkap apa saja akibat yang terjadi dari perjanjian tersebut. Apakah perjanjian tersebut membawa dampak negatif untuk semua sisi kehidupan, ataukah ada sisi kehidupan yang berkembang positif akibat dari perjanjian tersebut. Perjanjian 7 Januari 1681 merupakan perjanjian pertama antara Kerajaan Cirebon dengan VOC, perjanjian ini menjadi tonggak bersemainya kekuasaan VOC di Cirebon yang kemudian disusul dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Maka dari itu penulis akan mencoba mengkajinya dengan judul: “**Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M).**”

²⁰ Zaenal Masduqi, 2011, *Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*, Cirebon: Nurjati Press, hlm. 24



B. Rumusan Masalah

Penelitian ini secara umum berusaha untuk mengungkapkan bagaimana peristiwa Perjanjian 7 Januari 1681 dapat terjadi dan apa saja implikasi yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut di Kerajaan Cirebon.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Perjanjian 7 Januari 1681 di Kerajaan Cirebon terjadi?
2. Bagaimana implikasi dari Perjanjian 7 Januari 1681 terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi Kerajaan Cirebon tahun 1681 Masehi sampai 1755 Masehi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Perjanjian 7 Januari 1681 terjadi, dan menganalisis apa saja implikasi yang disebabkan dari perjanjian tersebut. Tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui proses terjadinya peristiwa Perjanjian 7 Januari 1681 di Kerajaan Cirebon.
2. Mengetahui implikasi dari Perjanjian 7 Januari 1681 terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi Kerajaan Cirebon tahun 1681 Masehi sampai 1755 Masehi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai Sejarah Cirebon, khususnya mengenai Perjanjian 7 Januari 1681 yang merupakan awal dan tonggak berdirinya VOC dalam menguasai Cirebon serta apa saja implikasi yang terjadi dari perjanjian tersebut. Selanjutnya melalui penelitian ini peneliti berharap dapat menarik hikmah dan belajar dari peristiwa sejarah tersebut untuk kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik. Melalui penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengembangan khazanah keilmuan Sejarah dan Peradaban Islam khususnya Sejarah Cirebon, serta dapat menjadi masukan yang positif bagi penelitian mengenai Sejarah Cirebon di masa-masa mendatang.



D. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai sejarah lokal yakni Sejarah Cirebon. Kajian ini akan membahas Perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dengan kompeni (VOC) dan seperti apa implikasi yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Dengan demikian kajian ini akan terfokus pada implikasi yang ditimbulkan dari Perjanjian 7 Januari 1681 khususnya terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Kerajaan Cirebon tahun 1681 Masehi- 1755 Masehi. Dalam rentang waktu tersebut akan diteliti seperti apa implikasi yang ditimbulkan setelah perjanjian tersebut ditandatangani, dimulai pada tahun dilakukannya perjanjian yaitu 1681 M sampai 1755 M. Pada tahun 1755 M terjadi wabah penyakit di Kota Cirebon sehingga angka kematian penduduk menjadi tinggi. Tahun 1755 menjadi batas akhir durasi waktu dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Adapun beberapa hasil historiografi berupa laporan penelitian ataupun laporan penelitian yang dibukukan yang berkaitan tentang Sejarah Cirebon yang dijadikan *literature review* oleh penulis di antaranya :

1. Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas.

Sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD), diketuai oleh Edi S. Ekadjati. Penelitian tersebut merupakan hasil kerjasama antara Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat pada tahun 1991 Masehi. Laporan penelitian setebal 270 halaman ini menjelaskan proses berdirinya Kerajaan Islam Cirebon, bagaimana situasi dan kondisi Cirebon abad ke-17 dari berbagai aspek kehidupan, dan bagaimana kompeni (VOC) dapat masuk ke Cirebon. Laporan ini sangat signifikan bagi penulis dalam menjawab rumusan masalah yang menjadi acuan dilakukannya penelitian.



2. Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 hingga Pertengahan Abad ke-20).

Buku yang membahas tentang Cirebon dalam kurun waktu sekitar 5 abad ini merupakan hasil penelitian dari tim peneliti dan penyusunan yang diketuai oleh A. Sobana Hardjasaputra. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011. Cirebon dalam Lima Zaman menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi Cirebon pada zaman Hindu-Budha, zaman Kerajaan Islam, zaman Kompeni (VOC), zaman Penjajahan Hindia Belanda, dan zaman Pendudukan Jepang. Urgensi buku ini bagi penelitian adalah utamanya menjadi rujukan dalam pembahasan BAB III dan BAB IV.

3. Carita Purwaka Caruban Nagari Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah.

Karya tulis yang dibukukan ini merupakan hasil karya dari Atja yang diterbitkan pada tahun 1986 Masehi. Buku ini diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat. Carita Purwaka Caruban Nagari (CPCN) adalah karya Pangeran Aria Cirebon yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1972 oleh Ikatan Karyawan Museum di Museum Pusat, Jakarta; sebagai Seri Monografi No.5. Buku ini berisi tentang sejarah yang berkaitan dengan asal mula Cirebon hingga menjadi sebuah Kerajaan Islam, dan juga membahas tentang tokoh-tokoh penerus jejak Susuhunan Jati (Sunan Gunung Jati) serta perkembangan yang terjadi pada masa itu. Signifikansi adanya buku ini bagi penulis sebagai sumber penulisan terutama pada BAB II.

4. Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479-1809.

Buku Sejarah Cirebon yang disusun oleh Unang Sunardjo yang diterbitkan oleh Penerbit Tarsito Bandung pada tahun 1983. Buku ini menggambarkan situasi dan kondisi Kerajaan Cirebon pada masa lampau (1479-1809) yaitu mengenai aspek pemerintahan dan politiknya. Di antara pembahasan pada buku ini yaitu bagaimana Cirebon pada masa sebelum Islam, masa Islam –masa Sunan Gunung Jati, Panembahan Ratu, Panembahan Girilaya, dan masa-masa pemerintahan



Kesultanan-kesultanan Cirebon. Urgensi dari buku ini sebagai sumber untuk memperkaya pembahasan pada BAB II.

5. Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial

Hasil penelitian yang dibukukan ini mendeskripsikan tentang perkembangan Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial ini merupakan sebuah karya yang ditulis oleh Zaenal Masduqi yang diterbitkan Nurjati Press pada tahun 2011. Buku ini berisi tentang pemerintahan Cirebon hingga abad ke-20, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi menjelang Cirebon menjadi *Gemeente* (kotapraja/kotamadia), dan pembentukan serta perkembangan *Gemeente* Cirebon. Signifikansi buku ini bagi penulis adalah menjadi sumber untuk memperkaya pembahasan situasi dan kondisi Cirebon setelah VOC berhasil menancapkan pengaruhnya di Cirebon. Selain itu melalui buku ini dapat menjadi sumber untuk memperkaya pembahasan pada BAB III dan BAB IV.

Lima karya di atas secara umum menyebutkan mengenai Perjanjian 7 Januari 1681 Masehi dan menyebutkan beberapa implikasi yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Akan tetapi tidak ada yang menjelaskannya secara spesifik dan rinci atau dalam judul khusus bagaimana perjanjian tersebut terjadi serta seperti apa implikasi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat menjadi pelengkap karya-karya yang sudah ada mengenai Sejarah Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Teori merupakan alat untuk melakukan suatu analisis, yaitu merupakan alat untuk memahami kenyataan atau fenomena, dalam hal ini adalah sejarah. Dalam penelitian mengenai Perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dengan kompeni (VOC) ini menggunakan teori pada tingkatan makro yakni analisis dilakukan pada tingkatan struktur. Teori yang akan digunakan untuk menganalisis peristiwa sejarah dalam penelitian ini adalah Teori Struktural Konflik, yang merupakan pendapat dari Ralp Dahrendorf.



Teoritis konflik Ralp Dahrendorf menjelaskan bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Teori ini melihat pertikaian dan konflik ada dalam sistem sosial, dan berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Kemudian apa pun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas, dan teoritis konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.²¹

Dalam buku Pengantar Sosiologi Ekonomi, Damsar menerangkan Teori Struktural Konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki elemen yang berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi, konflik, dan perpecahan. Konflik ada dimana-mana. Setiap struktur terbangun didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.²²

Untuk lebih memahami teori di atas, berikut adalah asumsi dasar yang dimiliki oleh teori struktural konflik menurut pendapat Ralp Dahrendorf:

- a. Setiap masyarakat, dalam setiap hal, tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial terdapat di mana-mana.

Teori struktural konflik melihat masyarakat pada proses perubahan. Hal tersebut terjadi karena elemen-elemen yang berbeda sebagai pembentuk masyarakat (struktur sosial) mempunyai perbedaan pula dalam motif, maksud, kepentingan, atau tujuan. Perbedaan yang ada tersebut menyebabkan setiap elemen berusaha untuk mengusung motif atau tujuan dari struktur. Ketika motif atau tujuan telah menjadi bagian dari struktur maka di satu sisi elemen tersebut cenderung untuk mempertahankannya. Pada sisi yang lain, elemen lain terus berjuang mengusung motif atau kepentingan dirinya menjadi motif atau kepentingan struktur. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut adalah perubahan

²¹ George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2007, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-6*, Jakarta: Kencana, hlm. 153

²² Damsar, 2009, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, hlm. 55



yang senantiasa diperjuangkan oleh setiap elemen terhadap motif, maksud, kepentingan, atau tujuan diri.

- b. Setiap masyarakat, dalam setiap hal, memperlihatkan pertikaian dalam konflik; Konflik sosial terdapat di mana-mana.

Perbedaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan diri merupakan sumber terjadinya pertikaian dan konflik di antara berbagai elemen dalam struktur sosial. Selama perbedaan tersebut masih terdapat di dalam struktur, maka selama itu pula pertikaian dan konflik dimungkinkan ada. Ketidaksamaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan menurut teoritisi konflik adalah realitas kehidupan sosial.

- c. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.

Ketidaksamaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan dari berbagai elemen merupakan sumber pertikaian dan konflik. Selanjutnya, pertikaian dan konflik menyebabkan disintegrasi dan perubahan dalam struktur sosial. Ini berarti bahwa berbagai elemen yang membentuk struktur tersebut mempunyai sumbangan terhadap terjadinya disintegrasi dan perubahan dalam struktur tersebut.

- d. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Keteraturan, keharmonisan atau kenormalan yang terlihat dalam masyarakat, dipandang oleh teoritisi konflik, sebagai suatu hasil paksaan dari sebagian anggotanya terhadap sebagian anggotanya yang lain. Kemampuan memaksa dari sebagian anggota masyarakat berasal dari kemampuan mereka untuk memperoleh kebutuhan dasar yang bersifat langka seperti hak istimewa, kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan prestise lainnya.²³

Berdasarkan asumsi dasar tersebut peneliti akan menggunakannya sebagai alat untuk menganalisis mengapa Perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dengan kompeni (VOC) dapat terjadi. Dan bagaimana implikasi yang ditimbulkannya, khususnya pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Kerajaan Cirebon tahun 1671-1755 Masehi.

²³ *Ibid.*, hlm. 56-58



G. Metode Penelitian

Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain sejarah juga dituntut memiliki seperangkat aturan dan prosedur kerja yang disebut metode, yaitu metode sejarah. Dalam sistem keilmuan, metode merupakan seperangkat prosedur, alat yang digunakan sejarawan dalam tugas meneliti dan menyusun sejarah.²⁴ Dalam pembahasan yang akan dilakukan dalam kajian ini pun menggunakan metode sejarah dan juga menggunakan metode analisis-deskriptif. Sebagai seperangkat prosedur, metode sejarah terdiri dari empat langkah yakni sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahapan ini merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan dalam sebuah penelitian.²⁵ Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka sumber-sumber yang dicari dan harus ditemukan adalah buku-buku atau dokumen mengenai Sejarah Cirebon, khususnya Perjanjian 7 Januari 1681 dan implikasinya, serta tulisan-tulisan atau arsip-arsip yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dan saat kompeni berada di Cirebon, khususnya arsip Perjanjian 7 Januari 1681. Oleh sebab itu, peneliti harus lebih dahulu menggunakan kemampuan pikiran untuk mengatur strategi: di mana dan bagaimana peneliti akan mendapatkan bahan-bahan tersebut; siapa-siapa atau instansi apa yang akan dihubungi; berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi kalau ke tempat-tempat lain, untuk fotokopi, informan, dan lain-lain. Pengumpulan sumber-sumber nantinya akan ada yang termasuk ke dalam sumber primer atau sumber-sumber asli yang sezaman dengan peristiwa sejarah, dan ada yang termasuk ke dalam sumber sekunder atau apa-apa yang telah ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama (asli).

²⁴ Aminuddin Kasdi, 2005, *Memahami Sejarah*, Surabaya: UNESA University Press, hlm. 10

²⁵ Helius Sjamsuddin, 2007, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 86



2. Kritik

Pada tahapan ini dilakukan verifikasi, atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber.²⁶ Tahapan ini dilakukan setelah semua sumber-sumber atau data yang berkaitan dengan penelitian, yakni Perjanjian 7 Januari 1681 dan implikasi yang ditimbulkannya dapat terkumpul. Tujuan dari kegiatan ini ialah bahwa setelah peneliti berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitian, maka tidak menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah selanjutnya adalah menyaringnya secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihan. Langkah-langkah inilah yang disebut kritik sumber, baik terhadap bahan materi (ekstern) sumber maupun terhadap substansi (isi) sumber.²⁷

3. Interpretasi

Pada tahap ini, setelah memperoleh sejumlah fakta yang cukup, peneliti merangkaikan fakta-fakta itu menjadi suatu keseluruhan yang masuk akal.²⁸ Tahap interpretasi ini peneliti mencari kererkaitan antar berbagai fakta yang telah ditemukan, mengungkapkan sebab akibatnya, faktor-faktor terjadinya dan kemudian menafsirkannya. Penafsiran yang dihasilkan berusaha menghubungkan fakta-fakta yang telah diperoleh, sehingga menjadi kronologi sejarah yang logis.

4. Historiografi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah selesai melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada, maka peneliti melanjutkan pada tahap terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Tujuan kegiatan ini adalah merangkaikan fakta-fakta menjadi kisah sejarah. Historiografi menurut Gottschalk adalah konstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses.²⁹

²⁶ Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, hlm. 99

²⁷ Helius Sjamsuddin, *Op.Cit.*, hlm. 131

²⁸ Aam Abdillah, 2012, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 30

²⁹ *Ibid.*, hlm. 30



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat mengenai pembagian bab-bab yang akan ada dalam penulisan hasil penelitian. Sistematika penulisan ini tentunya berkaitan dengan tema dan judul yang diangkat oleh penulis, sehingga dapat menjawab setiap pertanyaan dari penelitian ini serta dapat memberikan gambaran mengenai Perjanjian 7 Januari 1681 dan implikasinya di Kerajaan Cirebon khususnya pada tahun 1681 M-1755 M.

Bab I, berisi pendahuluan sebagai pengantar untuk sampai kepada pembahasan-pembahasan pada bab selanjutnya. Pendahuluan terdiri dari latar belakang pengambilan tema Sejarah Cirebon khususnya Perjanjian 7 Januari 1681 dan implikasinya di Kerajaan Cirebon, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan bagaimana sistematika penulisannya.

Bab II, memuat gambaran umum Cirebon sebelum kedatangan VOC. Pada bab ini akan dipaparkan seperti apa Cirebon pada masa sebelum Sunan Gunung Jati. Selanjutnya akan diterangkan juga ketika Cirebon menjadi kerajaan Islam pada masa Sunan Gunung Jati.

Bab III, menjelaskan tentang Perjanjian 7 Januari 1681. Pada bab ini diterangkan seperti apa Cirebon menjelang Perjanjian 7 Januari 1681. Selanjutnya akan diuraikan kronologis Perjanjian 7 Januari 1681 dan isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini merupakan perjanjian persahabatan yang pertama dilakukan di Kerajaan Cirebon antara VOC dengan tiga Pangeran Cirebon.

Bab IV, memuat pembahasan mengenai implikasi dilakukannya Perjanjian 7 Januari 1681 Masehi di Kerajaan Cirebon. Pada bab ini akan diuraikan apa saja implikasi dari perjanjian tersebut dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Kerajaan Cirebon tahun 1681 M- 1755 M.

Bab V, merupakan bagian penutup berupa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan pokok yang disebutkan dalam rumusan masalah. Pada bab ini juga dilengkapi dengan saran untuk penelitian selanjutnya mengenai kajian yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Naskah Perjanjian 7 Januari 1681. Sumber: Arsip Cirebon No 38.3, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Halaman Terakhir Perjanjian 7 Januari 1681. Sumber: Kantor Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Cirebon

Buku

- Abdillah, Aam. 2012. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
Abimanyu, Soedjipto. 2014. *Babad Tanah Jawi*. Yogyakarta: Laksana.
Ambary, Hasan Muarif. 1996. *Peran Cirebon sebagai Pusat Perkembangan dan Penyebaran Islam* dalam Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah “Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra”. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Atja. 1986. *Carita Purwaka Caruban Nagari Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
Buchori, Didin Saefuddin. 2009. *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
Daliman, A. 2012. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
Danasasmita, Saleh dkk. Tanpa Tahun. *Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat*. Bandung: Proyek Penerbitan Buku Sejarah Jawa Barat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 1983-1984.
Fitria, Putri. 2014. *Kamus Sejarah & Budaya Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
Hardjasaputra, A.Sobana, dkk. 2011. *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20)*. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Iskandar, Yoseph dkk. 2000. *Negara Gheng Islam Pakungwati Cirebon*. Bandung: Padepokan Sapta Rengga.
Iskandar, Yoseph. 1997. *Sejarah Jawa Barat (Yuganing Rajakawasa)*. Bandung: Geger Sunten.
Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta : PT Gramedia.
Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA University Press.
Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
Lubis, Nina H., dkk. 1956. *Sejarah Tatar Sunda Jilid 1*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.



- Lubis, Nina H. Tanpa tahun. *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Masduqi, Zaenal. 2011. *Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*. Cirebon: Nurjati Press.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Molsbergen, E.C. Godee. 2009. *Uit Cheribon's Geschiedenis*, diterjemahkan oleh Iwan Satibi.
- Naskah Mertasinga, *Sajarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati*. Alih Aksara dan Bahasa oleh Amman N. Wahju.
- Ricklefs, M.C. 2008. *A History of Modern Indonesia Since C. 1200* (diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Serambi) Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-6*. Jakarta: Kencana.
- Rochani, Ahmad Hamam. 2008. *Babad Cirebon*. Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
- Rosidin, Didin Nurul, dkk. 2013. *Kerajaan Cirebon*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sjamsuddin, Heliuss. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sudjana, T.D. dkk., 2015. *Kamus Bahasa Cirebon*. Bandung: Humaniora.
- Sunardjo, Unang. 1983. *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon 1479-1809*. Bandung: Tarsito.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wildan, Dadan. 2002. *Sunan Gunung Jati (antara Fiksi dan Fakta) Pembumian Islam dengan Pendekatan Struktural dan Kultural*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Laporan Penelitian

- Rosidin, Didin Nurul. 2014. *Ulama Paska Sunan Gunung Jati: Studi Atas Sejarah dan Jaringan Intelektual Islam Cirebon (Abad 16-18)*. Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD. 1991. *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas*. Bandung: Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Barat.
- Yani, Ahmad. 2010. *Pengaruh Islam terhadap Makna Simbolik Budaya Keraton-keraton Cirebon*. Penelitian Individual Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon: tidak diterbitkan.



Skripsi

Lizah, Nuril. 2012. *Perjuangan Mbah Muqoyyim (1689-1750) dalam Menyebarkan Agama Islam di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon*. Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Cirebon: Tidak Diterbitkan.

Nurhasanah. 2013. *Peran Nyi Mas Gandasari dalam Pendirian Pesantren Qura' Khusus Perempuan dan Pengaruhnya dalam Gerakan Dakwah Islam di Cirebon*. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon: tidak diterbitkan.

Sumber Internet: digunakan sebagai sumber lampiran ilustrasi gambar

<http://www.cirebontrust.com/sejarah-pemerintah-kota-cirebon-periode-ii-zaman-kegelapan-penjajahan-belanda.html>

<https://humaspdg.wordpress.com/2010/04/20/catatan-sejarah-kesultanan-banten/>

<http://fatonimilen1111.blogspot.co.id/2015/03/harta-karun-di-perairan-indonesia-bisa.html>

<https://kedungbantengcity.wordpress.com/2011/09/14/sejarah-keturunan-tionghoa-di-indonesia-demak-banten-cirebon/>

<http://erniilestarii.blogspot.co.id/2013/12/tanam-paksa.html>

<http://musikanegri.blogspot.co.id/2014/05/sosok-walisongo-teladan-sukses-berdakwah.html>

<https://elgibrany.wordpress.com/2014/12/27/peta-cirebon-administratif-1730-1942/>

<http://archive.kaskus.co.id/thread/2737276/>